



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN UTARA, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN
PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT.**

TANGGAL 2 NOVEMBER 2021

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke	:	6 (enam)
Jenis Rapat	:	Panja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 02 November 2021
W a k t u	:	Pukul 13.14 WIB s/d 16.06 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
Ketua Rapat	:	Drs. M. Nurdin, MM
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	A. Anggota : Fisik 9 Orang, Virtual 6 Orang, dan Ijin 6 Orang dari 80 orang anggota yang terdiri dari 9 Fraksi. B. Undangan : 1) Menteri Hukum dan HAM RI, diwakili Dirjen PP Kemenkumham, selaku ketua Tim Panja Pemerintah; 2) Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Dirjen Anggaran; 3) Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Dirjen Plt. Sekjen Kemendagri; 4) Menteri PAN dan RB, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; dan 5) Sekretaris Mahkamah Agung.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, dipimpin dan dibuka Ketua Rapat Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.14 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN.

- A. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.. dengan materi pembahasan Konsideran, Substansi, Substansi Baru, Redaksional, Dihapus, dan Meminta penjelasan, sebagai berikut :
 1. Jumlah DIM Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. ;
 - Total DIM yang akan dibahas sebanyak 66 (enam puluh enam) DIM.
 - Dim yang bersifat tetap sebanyak 15 (lima belas) DIM, yaitu DIM Nomor 2,3,20,22,25,29,33,37,45,46,47,63,64,65,66.
 - DIM yang bersifat Substansi sebanyak 5 (lima) DIM, yaitu 5,7,9,54,56.
 - DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 2 (dua) DIM, yaitu 4,55.
 - DIM yang bersifat Redaksional sebanyak 25 (duapuluh lima) DIM, yaitu 1, 8, 14, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50.
 - DIM yang dihapus sebanyak 10 (sepuluh) DIM yaitu 6 , 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19.
 - DIM yang meminta penjelasan sebanyak 9 (Sembilan) DIM, yaitu 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
 2. Dim yang bersifat tetap secara langsung disetujui oleh Panja dan DIM yang bersifat redaksional disetujui Panja untuk dibahas dalam Tim Perumus (TIMUS) atau Tim Sinkronisasi (TIMSIN), untuk DIM yang bersifat perubahan substansi akan dibahas dalam Rapat Panja.

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi terkait penyempurnaan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. ditutup pukul 16.06 WIB.

Jakarta, 02 November 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001